

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang- Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok- Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).

Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok- Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22).

Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959).

Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492).

Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 147 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525).

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 98).

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2017 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 137).

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 595).

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 984).

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1098).

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208).

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-022-021/PUU-I/2003 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terhadap UUD NRI Tahun 1945, tanggal 16 Juni 2011.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap UUD NRI Tahun 1945, tanggal 13 November 2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XII/2014 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap UUD NRI Tahun 1945, tanggal 3 Oktober 2014.

BUKU

Arizona, Yance, 2014, *Konstitusionalisme Agraria*, Yogyakarta : STPN Press.

Asshidiqie, Jimly, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta : Konstitusi Press.

-----, 2010, *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas

- , 2009, *Green Constitution : Nuansa Hijau UUD NRI Tahun 1945*, Jakarta : Rajawali Press.
- Fauzi, Noer, 2003, *Bersaksi Untuk Pembaharuan Agraria Dari Tuntutan Lokal Hingga Kecenderungan Sosial*, Yogyakarta : INSIST Press.
- Hasiman, Ferdy, 2019, *Freeport Bisnis Orang Kuat vs Kedaulatan Negara*, Jakarta: Kompas.
- Huda, Dr. Ni'matul, S.H, M.Hum dan R. Nazriyah, 2017, *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang- Undangan* , Bandung ; Nusa Media.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Peneletian Hukum*, Jakarta : Kencana.
- M. Hadjon, Philipus, et.all, 2008, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cetakan ketiga, Yogyakarta : Gadjah Mada Press.
- Redi, Ahmad, 2017, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral dan Batubara*, Jakarta : PT. Sinar Grafika.
- Saleng, Abrar, 2004, *Hukum Pertambangan*, Yogyakarta : UII Press.
- Sasmitha, Tody dkk, 2014, *Pemaknaan Hak Menguasai Negara oleh Mahkamah Konstitusi (Kajian terhadap Putusan MK No. 35/PUU-IX/2012; Putusan MK No. 50/PUU-IX/2012; dan Putusan MK No.3/PUU-VIII/2010)*, Yogyakarta : STPN Press.
- Sumardjono, Maria S.W, 2009, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi* Cet.6 Edisi Revisi, Jakarta : Kompas Gramedia.
- Sumardjono, Maria S.W, Nurhasan Ismail, Ernani Rustiadi, Abdullah Aman Damai, 2011, *Pengaturan Sumber Daya Alam di Indonesia Antara yang Tersurat dan Tersirat : Kajian Kritis Undang- Undang terkait Penataan Ruang dan Sumber Daya Alam*, Yogyakarta: UGM Press.
- Soekanto, Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia (UI Press).
- Trihastuti, Nanik, 2013, *Hukum Kontrak Karya Pola Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Indonesia*, Malang : Setara Press.

JURNAL

- Junita, Fifi, *The Foreign Mining Investment Regime in Indonesia : Regulatory Risk Under Resources Nationalism Policy and How International Investment Treaties Provide Protection*, Journal of Energy & Natural Resources Law Vol. 33 2015.

Muhajir, Mumu dkk, *Harmonisasi Regulasi dan Perbaikan Tata Kelola Sumber Daya Alam di Indonesia*, Jurnal Anti Korupsi INTEGRITAS Vol 5 Edisi (2-2), Desember 2019.

Pradipto, Rimawan dkk, *Ketika Kekayaan Alam Tidak Menyejahterakan : Pembelajaran dari Pencegahan Korupsi Sektor Sumber Daya Alam*, Jurnal Anti Korupsi INTEGRITAS Vol 5 Edisi (2-2) Desember 2019.

Redi, Ahmad, *Darurat Kebijakan Pemenuhan Kebutuhan Hasil Sumber Daya Alama di Pasar Dalam Negeri*, Jurnal Rechtsvinding Volume 4 Nomor 2, Agustus 2015.

Syahrir, Ika, *Kebijakan Hilirisasi Mineral : Reformasi Kebijakan untuk Meningkatkan Penerimaan Negara*, Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Vol 1 No. 1 Tahu 2017.

Widiowati, Dyah Ayu dkk, *Hak Penguasaan Atas Sumber Daya Alam dalm Konsepsi dan Penjabarannya dalam Peraturan Perundang- Undangan*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 16 No. 2- Juni 2019.

KARYA ILMIAH (SKRIPSI, THESIS, DAN DISERTASI) DAN LAPORAN PENELITIAN

Yurista, Ananda Prima, 2012, *Pelaksanaan Peraturan Pengelolaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua Studi Kasus Di Kabupaten Blora*, Skripsi, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Desrian C., Chocky, 2018, *Analisis Yuridis Pelarangan Ekspor Konsentrat Pada PT. Freeport Indonesia Berdasarkan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*, Skripsi, Medan, Fakultas Hukum, Universitas Sumatra Utara.

Maulana, Roni Septian, 2013, *Analisis Yuridis Kebijakan Pemurnian Mineral dan Batubara Guna Meningkatkan Nilai Tambah*, Skripsi, Lampung, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Warbuton, eve, 2018, *Our Resources Our Rules : A Political Economy of Nationalism in Indonesia's Resource Sectors*, Disertasi, Canberra, The Australian Natinal University.

Umma, Dhona Hanifatul, 2019, *Analisisi Yuridis Kompleksitas Permasalahan Tata Kelola Hilir Gas Bumi di Indonesia*, Skripsi, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Khomsita, Riyana Dwi, 2019, *Analisis Yuridis Pengujian Undang- Undang Ketenagalistrikan Serta Implikasinya Terhadap Hak Menguasai Negara*, Skripsi, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

LAPORAN

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2019.

Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Negara atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019.

PUSTAKA LAMAN

Huzaini, M. Dani Pratama, *Membongkar Kerancuan Regulasi Minerba di Indonesia*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/membongkar-kerancuan-regulasi-minerba-di-indonesia-lt58cf8ccc54b2d?page=all> diakses pada tanggal 25 Februari 2022.

PUSHEP.or.id, *Industrialisasi Pertambangan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah*, <https://pushep.or.id/industrialisasi-pertambangan-mineral-untuk-peningkatan-nilai-tambah/> diakses pada tanggal 30 Desember 2020.

Kementerian Perindustrian.co.id, *DMO Olahan Mineral Tidak Diatur UU Minerba*, Berita Industri, <https://kemenperin.go.id/artikel/6980/DMO-Olahan-Mineral-Tidak-Diatur-UU-Minerba>, diakses pada tanggal 28 Juni 2022

LAINYA

Bahan Materi Faisal Basri yang berjudul *Minerba untuk siapa?* pada seriang Webinar online Kebijakan Pengelolaan Industri Pertambangan dan Pengolahan- Pemurnian di Indonesia yang diselenggarakan oleh PERHAPI pada tanggal 29 Juli 2020.

Bahan Pemaparan Kementerian Perindustrian yang berjudul *Strategi Pengembangan Industri Hilir Logam Berbasis Nikel di Indonesia*, yang disampaikan dalam serial webinar onliner Masa Depan Hilirisasi Nikel Indonesia yang diselenggarakan oleh Direktorat Jendral, Kementerian ESDM pada tanggal 13 Oktober 2020

Bahan materi yang disampaikan oleh Irwandy Arif (Staf Khusus Menteri Bidang Percepatan dan Tata Kelola Minerba) yang berjudul *Perkembangan Hilirisasi Nikel Indonesia*, pada webinar “Masa Depan Hilirisasi Nikel Indonesia” yang diselenggarakan pada tanggal 13 Oktober 2020.

Bahan Materi Pelatihan Dasar Hukum Pertambangan Mineral dan BATUBARA Tahun 2021 Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) yang diselenggarakan pada senin, 12 Juli 2021.

Izzaty dan Suhartono, *Kebijakan Percepatan Larangan Ekspor Ore Nikel dan Upaya Hilirisasi Nikel*, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Startegis Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Vol,XI No.23/ Puslit/ Desember/ 2019.

Naskah Akademik Perubahan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara.

Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020-
2024.

Saarlinen, Emeilia dan Marten Sievers, 2011, *ILO Value Chain Development
Briefing Paper I, Combining Value Chain Development and Local
Developmemt*, Internatinal Labour Organization.

Soegiyono, *Pentingnya Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan*, Kajian dan Hukum Kedirgantaraan, Lembaga Penerbangan dan
Antariksa Nasional

Tjahjapriadi, Cornelius dan Rudi Handoko, 2019, *Hilirisasi Komoditas Nikel :
Peluang dan Tantangan*, Warta Fiskal (Merancang Lompatan Ekonomi)